

**Analisis Rekrutmen Politik: Studi Pada Rekrutmen Anggota Baru DPC PDI  
Perjuangan Kota Semarang Tahun 2012-2013**

Oleh :

Muhammad Agam Ashari (14010110130113)

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email : [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRAKSI**

Skripsi ini berjudul “Analisis Rekrutmen Politik: Studi pada Rekrutmen Anggota Baru DPC PDI Perjuangan Kota Semarang Tahun 2012-2013”. Disusun oleh Muhammad Agam Ashari, NIM: 14010110130113, Program Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di bawah bimbingan Budi Setiyono, S.Sos, M.Pol.Admin, Ph.D dan Dra. Rina Martini, M.Si.

Partai politik memegang peranan penting dalam mencetak calon pemimpin bangsa. Dapat dikatakan bahwa baik atau tidaknya pemimpin tergantung dari kualitas partai dalam melakukan rekrutmen dan pendidikan anggota. PDI Perjuangan merupakan partai yang besar dan memiliki basis massa yang luas. Kebesaran nama PDI Perjuangan merambah hingga ke daerah-daerah seperti di Jawa Tengah termasuk di Kota Semarang. Inilah yang melatar belakangi peneliti untuk mengetahui bagaimana PDI Perjuangan mampu memperoleh tingkat elektabilitas yang tinggi dan juga memiliki banyak anggota.

Metodologi penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kasus. Desain penelitian yang digunakan yaitu dengan tipe diskriptif analitis dengan pengumpulan data melalui wawancara dengan sejumlah informan yakni fungsionaris/kader PDI Perjuangan Kota Semarang dan meneliti dokumen.

Peneliti menganalisis semua fenomena yang melatar belakangi proses rekrutmen di PDI Perjuangan, termasuk trah Soekarno yang melekat pada Ketua Umum PDI Perjuangan. PDI Perjuangan tidak menerapkan suatu strategi khusus dalam merekrut anggotanya, itulah faktanya. Melalui penelitian ini penulis juga mendeskripsikan apa saja faktor pendukung serta penghambat PDI Perjuangan dalam melakukan rekrutmen anggota baru. Kedua faktor ini tentunya sangat mempengaruhi proses rekrutmen dan pencitraan partai sebagai partainya *wong cilik*.

PDI Perjuangan seharusnya lebih selektif dalam merekrut anggota karena dirasa proses rekrutmen ini sangat penting bagi mencetak calon pemimpin bangsa. PDI Perjuangan juga dirasa perlu untuk merubah paradigma mengenai konsep kepemimpinan Megawati yang memiliki trah Soekarno. Kader terlalu bergantung dengan pemimpin mereka sehingga keputusan pemimpin adalah mutlak. Hubungan seperti inilah yang mengakibatkan partai di daerah-daerah akan merasa kerdil dan tidak memiliki suara untuk beraspirasi.

Kata Kunci: Partai Politik, Sistem Rekrutmen dan Loyalitas Mutlak

## **ABSTRACT**

This thesis entitled "Political Recruitment Analyse: Studies on New Member Recruitment of DPC PDI Perjuangan Semarang Year 2012-2013". Compiled by Muhammad Agam Ashari, NIM: 14010110130113, Social Science Program and Political Science under the guidance of Setiyono Budi, S. Sos, M.Pol.Admin, Ph.D., and Dra. Rina Martini, M.Sc.

Political parties play an important role in the future leaders prints. It can be said that good or bad depending on the quality of the party's leader in conducting the recruitment and education of members. PDI-Perjuangan is a big party and have a broad mass base. Greatness name PDI-Perjuangan penetrating through to areas such as in Central Java, including in the city of Semarang. This is the background for researchers to determine how the PDI-Perjuangan is able to obtain a high level of electability and also has many members.

This study uses qualitative research methods with case studies. The study design used is the descriptive type of analytical data collection through interviews with a number of informants that functionaries of PDI-Perjuangan cadres Semarang and examine any documents.

Researchers analyzed all the phenomena of the background in the recruitment process of the PDI-Perjuangan, including Sukarno heritages are attached to the Chairman of the PDI-Perjuangan. PDI-Perjuangan does not implement a particular strategy in recruiting members, that's a fact. Through this study the authors also describe any factors supporting and inhibiting PDI perjuangan in recruit new members. Both of these factors would greatly affect the recruitment and imaging of the party as the "wong cilik" party's.

PDI-Perjuangan should be more selective in recruiting members because of perceived recruitment process is very important for future leaders prints. PDI-P is

also necessary to change the paradigm of the concept of leadership has Megawati Soekarno breeds. Cadre too dependent on their leaders so that the leader decision is an absolute. Relationships like these could lead the party in these areas will feel stunted and do not have a voice to aspire.

Keywords: Political Parties and the Recruitment System Absolute Loyalty

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berdaulat dan menganut sistem pemerintahan yang cukup baik yang dikenal dengan nama demokrasi. Pengertian demokrasi sering disebutkan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam sistem pemerintahan seperti ini, rakyat bebas untuk menggambarkan, mengekspresikan dan menyuarakan segala aspirasinya untuk mempengaruhi segala kebijakan yang mana akan berdampak langsung pada kehidupannya karena dalam sistem demokrasi sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM).

Dengan adanya kebebasan pada sistem demokrasi inilah masyarakat melakukan berbagai kegiatan dan aktivitas yang dapat mempengaruhi segala keputusan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah supaya kebijakan yang diambil tersebut dapat tepat sasaran dan dapat dirasakan dengan baik oleh rakyat. Demi terwujudnya hal tersebut, maka perlu adanya sebuah lembaga atau organisasi untuk menyalurkan aspirasi masyarakat supaya terdengar oleh pemerintah dengan kata lain rakyat butuh partai politik untuk membantu mereka dalam menyalurkan aspirasi.

Kenapa partai politik, karena partai politik merupakan sebuah wadah atau tempat dimana didalamnya terdapat sekelompok orang yang melakukan segala aktivitas dan kegiatan kepartaian demi terwujudnya tujuan bersama yang telah mereka sepakati sebelumnya. Partai politik juga seperti layaknya organisasi, lembaga, institusi maupun kelompok lainnya yang memiliki tujuannya masing-masing. Seperti yang diungkapkan oleh Miriam Budiarjo bahwa partai politik merupakan sebuah wadah bagi sekelompok orang yang memiliki pemikiran, ideologi, kepentingan dan ambisi yang sama sehingga mereka membentuk sebuah kelompok yang dinamakan partai politik supaya pemikiran dan kepentingan yang serupa tersebut dapat

dikonsolidasikan dengan demikian akan lebih besar pengaruh mereka dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan.<sup>1</sup>

Partai politik juga memiliki beberapa fungsi yaitu partai sebagai sarana komunikasi politik, partai sebagai sarana sosialisasi politik, partai politik sebagai sarana rekrutmen politik, partai politik sebagai sarana pengatur konflik. Dari keempat fungsi partai politik tersebut yang paling signifikan terhadap keberlangsungan sebuah partai politik adalah rekrutmen politik karena pada fungsi ini partai politik mulai mencari anggota baru untuk menyediakan calon-calon pemimpin baik dalam lingkup lokal maupun nasional.

Dalam sistem pemerintahan demokrasi modern saat ini, partai politik sangat dimanjakan dengan adanya kebebasan untuk aktif dan turut serta dalam proses pemerintahan. Salah satu bentuk partisipasi dari partai politik adalah mencetak calon pemimpin tersebut melalui fungsi rekrutmen politik. Proses rekrutmen dapat dilakukan secara terbuka, semi tertutup dan bahkan tertutup. Derajat keterbukaan rekrutmen akan dipengaruhi oleh derajat pelaksanaan sistem demokrasi suatu negara. Dengan sistem rekrutmen yang terbuka maka masyarakat akan dapat memilih pemimpin yang memiliki kapasitas dan integritas yang baik serta berakhlak mulia dan memiliki tujuan yang baik.<sup>2</sup>

Namun, terdapat banyak sekali permasalahan dalam proses perekrutan yang dilakukan oleh partai politik, misalnya dewasa ini banyak sekali artis dan selebriti yang dirangkul oleh partai politik dan terkadang partai politik tersebut merekrut tanpa melihat pengetahuan dan keahlian mereka, terutama yang berkaitan dalam dunia politik. Akibatnya kerap kali dilupakan perlunya sistem kaderisasi dalam tubuh partai politik.

---

<sup>1</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm: 403.

<sup>2</sup> Afan Gaffar, *Politik Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, Hal : 155.

Mestinya partai politik harus selalu mengingat, bahwa rekrutmen dari luar kader sangat rawan terhadap berbagai resiko. Pertama, ketidaksesuaian paham ideologis antara orang-orang yang direkrut dengan organisasi partai politik yang bersangkutan. Resiko kedua, terjebaknya suatu partai politik pada *pragmatisme* jangka pendek yang menjadikan organisasi partai politik sebagai kendaraan untuk berkuasa (Firmanzah: 2012).

Oleh karena itu, sistem kaderisasi dalam partai politik mesti diefektifkan dalam membentuk kader yang berintegritas, profesional, kredibel untuk menawarkan (*suplay*) produk politik yang berkualitas kepada pasar pemilih. Sistem kaderisasi jika dibuka tujuan dan substansi utamanya adalah untuk membentuk kader yang memiliki jiwa kepemimpinan. Sehingga caleg tersebut dapat berperan baik di parlemen. Jika kader berkualitas, sejatinya pejabat publik terpilih, yang telah lolos proses perekrutan akan baik pula. Kalau sudah demikian bukan hal mustahil peran partai politik mewujudkan Negara yang mampu mendongkrak kesejahteraan ekonomi rakyat akan nampak pula. Itulah tujuan ideal yang harus dilakukan partai politik sehingga penting untuk dilakukan perekrutan sumber daya manusia agar memiliki jiwa kepemimpinan nantinya.

Ada yang menarik dari salah satu partai politik di Indonesia, yaitu PDI Perjuangan. Tak hanya aktif berkiprah di kancah nasional, PDI Perjuangan juga aktif di daerah-daerah seperti di Jawa Tengah dan bahkan PDI Perjuangan menjadi partai terbesar di Jawa Tengah. Hal ini terbukti dengan diselenggarakannya pemilihan Gubernur Jawa Tengah yang lalu misalnya, pasangan Ganjar–Heru mampu mengalahkan suara dari dua calon lainnya yang mana Ganjar–Heru hanya disokong oleh satu partai yaitu PDI Perjuangan sedangkan lawannya hasil dari koalisi beberapa partai.

Partai PDI Perjuangan merupakan partai yang kuat bahkan sampai ditingkat lokal, misalnya DPC PDI Perjuangan Kota Semarang. DPC PDI Perjuangan di Kota Semarang sangat aktif melakukan berbagai kegiatan peduli sosial seperti tasyakuran, bantuan kepada anak-anak yatim piatu, panti asuhan, jalan sehat, bagi-bagi sembako kepada fakir miskin, menyelenggarakan pasar murah hingga menggelar kejuaraan pencak silat. Dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan peduli sosial inilah DPC PDI Perjuangan Kota Semarang mendapatkan apresiasi positif oleh warga Kota Semarang sehingga mereka percaya dan menganggap bahwa PDI Perjuangan adalah partai yang benar-benar peduli pada nasib rakyat kecil yang suaranya seringkali tak terdengar oleh pemerintah.

Suksesnya partai PDI Perjuangan di Jawa Tengah khususnya di Kota Semarang tentunya menimbulkan pertanyaan bagaimana strategi yang dilakukan partai ini dalam mencetak kader-kader yang berkualitas sehingga mampu menghimpun banyak suara dan mendapat kepercayaan dari rakyat

## PEMBAHASAN

Rekrutmen anggota baru yang dilakukan oleh suatu partai politik adalah sebuah tahap awal dalam melahirkan seorang kader partai, karena rekrutmen politik pada dasarnya adalah seleksi atau pengangkatan seseorang atau kelompok yang dilakukan oleh partai politik guna berpartisipasi dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Partai politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab melalui keikutsertaannya sebagai anggota salah satu partai politik. Partai politik juga sebagai suatu organisasi sangat berperan dalam mencetak pemimpin yang berkualitas dan berwawasan nasional.

PDI Perjuangan dalam melakukan perekrutan anggota baru tidak memiliki landasan aturan khusus dan ketentuan khusus. Persyaratan khusus yang harus dimiliki



seseorang untuk menjadi anggota partai itu tidak ada. Semua persyaratan yang ditetapkan di AD/ART PDI Perjuangan bersifat umum dan tidak mempersulit masyarakat dalam bergabung. Partai membuka peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk bergabung tanpa memandang SARA. Persyaratan menjadi anggota partai diatas sama dengan pernyataan Untung Sudjarno selaku Kepala Bidang Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan.

“Ohh, kalau syarat untuk menjadi anggota PDI Perjuangan itu sangat jelas bagaimana di undang-undang partai politik itu juga ada kalau umur itu harus 17 tahun keatas. Kemudian yang kedua mengisi formulir yang telah disediakan oleh DPC disertai foto satu lembar dan fotokopi KTP.”

Intinya untuk dapat bergabung dengan PDI Perjuangan, syarat yang paling mendasar adalah sudah berusia minimal 17 tahun, kemudian baru administrasi lainnya.

Dalam melakukan perekrutan anggota baru PDI Perjuangan juga tidak pilih-pilih. Seluruh masyarakat diperbolehkan masuk asalkan memenuhi persyaratan administratif. Hal ini mengakibatkan tingkat sumber daya manusia di dalam diri partai menurun karena anggota partai tanpa diseleksi langsung resmi diberikan KTA dan menjadi anggota partai. PDI Perjuangan beranggapan bahwa mereka merupakan partai yang besar dan memiliki jumlah anggota yang cukup banyak karena partai ini menyerap semua golongan baik dari kalangan bawah hingga menengah keatas, sesuai dengan pernyataan dari Herman Yoostam selaku Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Semarang sekaligus Calon Anggota Legislatif DPRD II Kota Semarang periode 2014-2019 Dapil 1.

“Mengenai sasaran tertentu itu tidak ada, kita membuka seluas-luasnya pintu kami untuk semua masyarakat yang ingin berpartisipasi dibidang politik bersama kami. Entah itu buruh, petani, nelayan bahkan pengusaha sekalipun. Mengenai pilih memilh itu tidak ada dari kami.”

PDI perjuangan mengklaim merangkul segala golongan tanpa memandang status sosial dan profesi, karena partai ini menganggap semua warga Negara berhak untuk berpartisipasi di bidang politik melalui partai. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Untung Sudjarno selaku Kepala Bidang Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan.

“Di PDI Perjuangan itu siapapun bisa menjadi anggota tanpa membedakan SARA dan status sosial. Kalau PDI Perjuangan mengambil sasaran rekrutmen orang yang sudah berpengalaman mungkin dia berpengalaman di bidang lain tapi belum tentu bila di partai. Perbedaan-perbedaan semacam itu tidak ada...”

Dalam pernyataan tersebut, cukup jelas bahwa PDI Perjuangan tidak mengutamakan pengalaman tertentu dalam merekrut anggota baru. Pengalaman yang sudah didapat sebelumnya belum tentu akan bermanfaat bagi partai, oleh karena itu partai tidak memberikan patokan tertentu dalam hal ini. Berikut pernyataan Hastuti salah satu anggota baru PDI Perjuangan kota Semarang.

“...mayoritas di PDI Perjuangan itu kan SDM nya rendah, karena kita menjaring semua golongan. Lain dengan partai lain seperti Golkar atau Demokrat yang mungkin SDM nya lebih tinggi. Mungkin kalau di partai lain kan secara tidak langsung kan seleksi tuh, tapi kalau PDI Perjuangan kan anggotanya mulai tukang becak, tukang batu nahn itu kan bisa dinamakan SDM yang cukup rendah dan kadang asal jeplak.”

Dari pernyataan diatas dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa dalam melakukan perekrutan, PDI Perjuangan merekrut semua golongan dari lapisan masyarakat. Hal ini membuat tingkat sumber daya manusia dalam diri partai ini kurang bila dibandingkan dengan partai kader lain. PDI Perjuangan dirasa perlu untuk memikirkan hal tersebut.

Dalam mengatasi hal tersebut PDI Perjuangan memiliki pelatihan kader dimana dalam pelatihan ini anggota partai akan diberi pendidikan politik sehingga pengetahuan berpolitiknya akan lebih baik.

Sistem kaderisasi dalam partai politik mesti diefektifkan dalam membentuk kader yang berintegritas, profesional, kredibel untuk menawarkan *suplay* produk politik yang berkualitas kepada pasar pemilih. Sistem kaderisasi jika dibuka tujuan dan substansi utamanya adalah untuk membentuk kader yang memiliki jiwa kepemimpinan. Jika kader berkualitas, sejatinya pejabat publik terpilih, yang telah lolos proses perekrutan akan baik pula. Jika sudah demikian bukan hal mustahil peran partai politik mewujudkan Negara yang mampu mendorong kesejahteraan ekonomi rakyat akan nampak pula. Itulah tujuan ideal yang harus dilakukan partai politik sehingga penting untuk dilakukan perekrutan sumber daya manusia agar memiliki jiwa kepemimpinan nantinya.

Dalam melakukan rekrutmen anggota baru, PDI Perjuangan tentunya memiliki beberapa kendala di dalamnya. Tidak semua usaha dalam melakukan rekrutmen anggota baru berjalan lancar tanpa ada hambatan. Hambatan–hambatan tersebut dapat dari internal hingga eksternal partai. Salah satu faktor penghambat dalam melakukan fungsi rekrutmen anggota baru PDI Perjuangan Kota Semarang adalah pengaruh dari media massa yang ditunggangi oleh politisi–politisi dari pihak yang bersaing. Melalui media massa tersebut, politisi atau pihak dari salah satu partai yang bertentangan akan selalu menyerang semua partai lain dan berusaha menunjukkan keburukan–keburukan dari partai tersebut sehingga hal ini diharapkan akan membentuk opini publik dan dampaknya akan mempengaruhi perolehan suara dalam pemilu.

Ada faktor penghambat, tentunya juga ada faktor pendukung dalam pelaksanaannya. Faktor pendukung inilah yang mana sebagai penyokong atau senjata partai dalam memperoleh dukungan dan mensukseskan proses rekrutmen anggota baru.

Terdapat beberapa faktor yang mendukung suksesnya proses rekrutmen anggota baru partai PDI Perjuangan Kota Semarang, yang pertama adalah kepengurusan partai

yang menjangkau masyarakat bahkan hingga di tingkat RW (Rukun Warga). Kepengurusan ini disebut sebagai anak ranting PDI Perjuangan. Anak Ranting ini tentunya akan lebih dekat dengan masyarakat dan lebih terasa pengabdianya karena terjun secara langsung ditengah–tengah kehidupan masyarakat. Kemudian faktor pendukung yang kedua adalah figur pemimpin. Menurut Untung Sudjarno, kenapa banyak masyarakat yang ingin bergabung dengan PDI Perjuangan adalah karena figur dari Megawati Soekarno Putri. Seperti dalam pernyataannya.

“...partai kami ini memiliki figur yang patut diteladani dan dicontoh seperti bu Megawati. Sehingga mereka yang menjadi anggota PDI Perjuangan sedikit atau banyak itu mereka tertarik dengan figur kami, figur pimpinan kami...”

Peneliti menemukan fakta menarik lainnya dalam melakukan penelitiannya di lapangan. Fakta menarik tersebut adalah berkembangnya mitos di masyarakat Kota Semarang bahkan di Provinsi Jawa Tengah mengenai figur pemimpin partai ini. Megawati Soekarno Putri dipercaya sebagian masyarakat sebagai titisan dari pendiri bangsa ini, yaitu Bung Karno. Masyarakat beranggapan bahwa Megawati mewarisi pemikiran, ide–ide, gagasan bahkan kharisma dari sang ayah. Tak khayal jika anggotanya banyak yang menaruh simpati dan hormat terhadap Megawati.

Hal ini tentu saja mempengaruhi proses rekrutmen partai dan dapat dijadikan sebagai faktor pendukung sehingga banyak masyarakat yang mempercayai mitos ini akan mendukung dan bergabung menjadi anggota partai. Pernyataan dari kedua anggota partai dan fungsionaris partai tersebut sesuai dengan pernyataan Suroto dalam bukunya yang berjudul “Partai-partai Politik di Indonesia” bahwa kepemimpinan partai ini lebih didasarkan atas kharisma yang berbau mitos-mitos. Terlihat pada Partai PDI yang kemudian lahir sempalannya terpisah menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri atas dasar kharisma yang dimiliki ayahandanya yaitu Bung Karno.

PDI Perjuangan tidak bisa dilepaskan dari trah Soekarno dan nama besar Megawati. Ini fakta yang mau tidak mau, suka atau tidak harus diterima. Kita bisa melihat drama soal pergantian pemimpin partai dari kongres ke kongres. Tidak ada yang berani menantang atau mencalonkan diri sebagai ketua umum PDI Perjuangan selama Megawati masih mau duduk disana.<sup>3</sup>

## PENUTUP

DPC PDI Perjuangan Kota Semarang menjunjung tinggi sistem demokrasi. Karena hal itu, DPC PDI Perjuangan Kota Semarang melakukan rekrutmen anggota baru secara terbuka. Setiap warga Negara Indonesia berhak untuk dapat perlakuan yang sama, termasuk turut serta dalam proses politik dengan bergabung dengan partai politik. Dalam melakukan rekrutmen anggota PDI Perjuangan membuka kesempatan untuk setiap Warga Negara Indonesia dengan mengingat Undang-undang No. 2 pasal 14 tahun 2008 tentang Partai Politik yang berbunyi warga Negara Indonesia dapat menjadi anggota partai politik apabila sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah. Di dalam AD/ART PDI Perjuangan dan Keputusan Kongres Partai juga menerangkan hal demikian. Persyaratan umum bagi calon anggota PDI Perjuangan terdapat dalam Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan Bab I Pasal (1). Tidak ada persyaratan khusus yang ditetapkan oleh partai DPC PDI Perjuangan Kota Semarang dalam hal ini karena pada dasarnya partai juga ingin merekrut sebanyak-banyaknya anggota, karena inilah esensi dari partai massa.

Namun, karena kurang selektifnya partai dalam melakukan rekrutmen menyebabkan PDI Perjuangan mengalami krisis SDM (Sumber Daya Manusia). Partai ini merekrut masyarakat tanpa pandang bulu. Hal ini tentunya baik yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat, akan tetapi perlu

---

<sup>3</sup> Lukman Ali, *"Bung Karno dan Megawati dalam Retorika"*, Dalam Afdal Tanjung, *"Maju tak Gentar PDIP Berkibar"*, Jakarta: YPTN, 2000, Hlm: 149

diingat bahwa fungsi rekrutmen ini adalah mencetak para pemimpin bangsa nantinya dan juga menentukan kualitas partai sehingga dirasa perlu untuk lebih selektif dalam perekrutannya.

Ada sebuah fakta menarik dari PDI Perjuangan dimana fakta tersebut dapat dianggap sebagai faktor pendukung dalam mendapatkan massa atau anggota. Fakta tersebut adalah pengkultusan terhadap Megawati Soekarno Putri. Disini dikatakan pengkultusan karena sebagian besar anggota PDI Perjuangan menganggap bahwa pemimpin mereka Megawati mewarisi pemikiran, ide-ide, gagasan bahkan kharisma dari ayahnya Ir. Soekarno. Apapun keputusan Megawati merupakan suatu kebenaran absolut bagi para anggota partai, ini berarti Megawati memiliki hak prerogatif yang tidak bisa ditentang oleh siapapun. Hal ini bertolak belakang dengan sistem demokrasi yang berkembang di Indonesia. Seharusnya dalam mengelola partai itu menggunakan sistem *bottom-up*, bukan *top-down*. Berlangsungnya sistem seperti ini di dalam PDI Perjuangan, mengakibatkan pengabaian aspirasi kepengurusan ditingkat bawah. Pengurus ditingkat bawah tidak berani melakukan kritik dan berbeda pandangan terhadap kekuasaan pusat.

Mengenai pola rekrutmen PDI Perjuangan di Kota Semarang yang tidak terarah sebaiknya lebih sedikit selektif lagi mengingat bahwasanya proses rekrutmen merupakan proses pencarian dan pelatihan untuk mencetak calon pemimpin yang mampu mengedepankan kepentingan rakyat. Karena rekrutmen yang seperti ini hanya akan merugikan partai, karena SDM (Sumber Daya Manusia) partai relatif rendah dan tidak terkontrol. Hal ini dapat memicu kemunduran partai dalam menjalankan segala fungsinya. Dirasa perlu untuk membuat suatu strategi khusus untuk rekrutmen anggota.

Loyalitas mutlak yang ada didalam PDI Perjuangan juga harus dihapuskan. Karena ini tidak sesuai dengan sistem demokrasi yang berkembang di Indonesia.

Selama ini segala keputusan dipegang oleh ketua umum, yaitu Megawati. Semua yang sudah menjadi putusannya tidak ada yang berani membantah. Hal ini tentunya akan mengkerdilkan kepengurusan yang ada di daerah. Partai politik yang baik adalah partai yang mampu menjaga pola interaksi yang baik antara keduanya. Struktur organisasi partai politik yang sistematis dapat menjamin aliran informasi dari bawah keatas maupun dari atas ke bawah. Sehingga nantinya akan meningkatkan fungsi kontrol dan koordinasi. Cara tradisional yang dipakai oleh PDI Perjuangan ini apabila tetap diteruskan dikhawatirkan akan tergerus oleh zaman dan akan ditinggalkan oleh masyarakat.

## Daftar Pustaka

1. Budiardjo, Miriam. 1994. *Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
2. Budiardjo, Miriam. 1998. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
3. Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
4. Dahl, Robert A. 1985. *Analisis Politik Modern*. Jakarta: Bumi Aksara.
5. Gaffar, Afan. 2006. *Politik Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
6. Gatara, Sahid. 2009. *Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan*. Bandung: Pustaka Setia.
7. Ghony, Djunaidi M, Fauzan Almanshur. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Ar-Ruzz Media.
8. Kartono, Kartini. 1996. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: CV Mandar Majuy.
9. Koentjaraningrat (ed), 1989. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia.
10. Lexy J. Moeloeng, M.A. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
11. Mac Iver, Robert. 1995. *The Modern State*. London: Oxford University Press.



12. Mas'ood, Mohtar dan Colin MacAndrews. 2008. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
13. Noer, Deliar. 1983. *Pengantar ke Pemikiran Politik*. Jakarta: CV Rajawali.
14. Rahman, Ali. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
15. Straus, Ansen, dan Juliet Cobin. 2003. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif, Tata Langkah dan Teknik-Teknik Teorisasi Data*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
16. Subakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
17. Syarbaini, Syahril dkk. 2008. *Sosiologi dan Politik*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
18. Undang-undang Nomor 02 Tahun 2008 Tentang *Partai Politik*, Jakarta: Sinar Grafika.